

PAPER NAME

**PILKADA DI MASA PANDEMI FINAL (1)-2
0-42.pdf**

AUTHOR

Arizka

WORD COUNT

5891 Words

CHARACTER COUNT

37541 Characters

PAGE COUNT

23 Pages

FILE SIZE

263.8KB

SUBMISSION DATE

Apr 5, 2023 3:14 PM GMT+7

REPORT DATE

Apr 5, 2023 3:15 PM GMT+7**● 13% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 13% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Manually excluded sources

Pilkada, Kohesi Sosial dan Pandemi Covid-19: Kajian Peniadaan dan Penundaan Pilkada 2020¹

Oleh

Arizka Warganegara*)

*) Dosen FISIP Universitas Lampung

I. PENDAHULUAN

Publik tentunya dapat membayangkan Pilkada kali ini adalah Pilkada yang paling berat yang akan dihadapi oleh seluruh elemen bangsa. Membayangkan dua *event* dijalankan secara simultan, pesta demokrasi dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Kajian ini mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan Pilkada ditiadakan atau setidaknya ditunda pada bulan April atau September 2021. Pemerintah dan DPR RI sudah memastikan Pilkada Desember 2020 tetap jadi dilaksanakan. Merujuk pada agenda tersebut, apa yang kemudian seharusnya menjadi *concern* publik hari ini. Tentu beragam pertanyaan muncul, misalkan bagaimana model Pilkada di era normal baru (*New Normal*)? apa konsekuensi dari penyelenggaraan Pilkada disaat Pandemi? bagaimana kesiapan perangkat Pilkada? beragam pertanyaan diatas tentunya bukan rangkaian pertanyaan yang mudah untuk dijawab.

Jika kita membicarakan beragam kemungkinan, Pasal 5, Paraturan KPU (PKPU) tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam disebutkan beberapa hal yang penting antara lain soal *Rapid Test* bagi penyelenggara, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi tubuh, physical distancing, larangan berkerumun, pengaturan jumlah peserta dan personel tugas dan pemanfaatan teknologi informasi untuk koordinasi dan menggantikan prosedur tatap muka.

Beberapa uraian dan identifikasi dalam PKPU diatas adalah protokol baku Covid-19. Hal ini mungkin akan terlihat mudah, akan tetapi bagaimana dengan pelaksanaan di lapangan? dan tentu saja konsekuensi penambahan biaya penyelenggaraan Pilkada yang terjadi? sebagai ilustrasi pengadaan APD tentu membutuhkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada slot mana anggaran negara akan dialihkan untuk pengadaan peralatan mitigasi Covid-19 disaat bencana seperti ini? semua pertanyaan diatas memerlukan sebuah kepastian jawaban dari para pihak pengambil kebijakan negara. Pada bagian lain penelitian yang dilakukan oleh Greer dkk. (2020: 1413) memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan diatas, Greer dkk menegaskan bahwa:

We argue that there will be no way to understand the different responses to COVID-19 and their effects without understanding policy and politics. We propose four key focuses to understand the reasons for COVID-19 responses: social policies to crisis management as well as recovery, regime type (democracy or autocracy), formal political institutions (federalism, presidentialism), and state capacity (control over health care systems and public administration). A research agenda to address the COVID-19 pandemic that takes politics as a serious focus can enable the development of more realistic, sustainable interventions in policies and shape our broader understanding of the politics of public health.

Hal ini kemudian ditambah dengan kondisi geografis dan demografis. Sebagai contoh, Lampung saja secara demografi beragam belum lagi teman-teman di wilayah timur Indonesia ditambah lagi soal *signal internet* yang tidak semua tempat dapat menikmati akses dengan lancar. Konsekuensi teknis, anggaran dan medis ini setidaknya harus dihitung dengan cermat sehingga pelaksanaa Pilkada yang tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 tidak menimbulkan masalah baru yang bisa saja mengurangi legitimasi hasil.

Akan sangat sulit membayangkan bagaimana petugas KPPS harus melakukan dua pekerjaan sekaligus, memastikan prosedur pemungutan suara berjalan baik dan juga memastikan Protokol penanggulangan Covid-19 tetap dilaksanakan. Ketidakpastian itu yang bisa saja kemudian berdampak pada kualitas Pilkada, membuat kemungkinan angka partisipasi yang angka partisipasi politik yang rendah dan akibat dari hal ini juga semakin terbukanya potensi permainan ‘deras’ politik uang (dengan argumentasi, pemilih diimingi uang oleh kandidat untuk ‘berani’ datang ke TPS) yang berakibat pemimpin yang terpilih adalah mereka dengan dukungan finansial kuat bukan yang sosok dengan kapasitas terbaik.

II. KAJIAN PUSTAKA

Covid-19, Pilkada dan Kohesi Sosial

Sebuah virus yang secara resmi diberi nama oleh WHO (World Health Organisation) sebagai *Corona Virus Disease 19* (COVID-19). Covid-19 ini adalah realita yang manusia harus hadapi. Banyak yang mengatakan ini adalah bagian dari perang senjata biologi dunia. Media terkenal Inggris, *the Guardian* menulis sebuah artikel yang berjudul *Russian media ‘spreading Covid-19 disinformation* (Rankin, 2020).

The Guardian menyoroti, media Pro Kremlin-Russia mengklaim bahwa Covid-19 ini adalah bagian dari senjata biologi yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan dibawa oleh Militer Amerika Serikat ke Tiongkok. *The Guardian* dalam bahasa jurnalistik menulis sebuah dokumen rahasia mengklaim bahwa virus ini kemungkinan adalah senjata biologi disebarkan oleh Militer Amerika Serikat (Rankin, 2020).

Tapi apapun itu, teori konspirasi memang membuka klaim-klaim yang mengejutkan sekaligus mencoba bermain di antara tabir nalar manusia. Media terkemuka yang lain, *The New Statesman* menulis artikel yang berjudul “*why conspiracy theories are deeply dangerous*” dalam satu tulisan Quassim Cassam menulis “*another key feature of conspiracy theories is that they tend to be highly speculative rather than based on firm evidence*” bahwa teori konspirasi lebih mengutamakan spekulasi ketimbang bukti nyata (Cassam, 2019).

Pandemi Covid-19 adalah sebuah realitas tidak dapat terbantahkan dan telah mengubah pola hubungan dan perilaku manusia seluruh dunia hari ini.

Pada bagian lain, saat ini kelompok agamawan Indonesia terbagi dalam dua kelompok besar setidaknya dalam menyikapi Covid-19. Kelompok pertama menilai Covid-19 sebagai takdir dan harus dihadapi manusia dengan mempertebal rasa percaya terhadap Tuhan serta kelompok kedua yang mencoba berdamai dengan realitas dan mencoba dengan menyelaraskan pandangan keagamaan dan 'sekular' medik. Dan, itulah sememangnya kondisi umat di era *post secular society*. Kondisi dimana setiap umat secara demokratis berhak menentukan pilihan *point of view* terhadap setiap ayat dalam kitab suci. Belum lagi gerakan yang cukup massif secara daring oleh kelompok *anti vaxeer* (atau kelompok anti vaksinasi) di dunia bisa saja menghambat proses pemulihan Pandemi Covid-19 (Burki, 2020).

Anthony Giddens dalam bukunya *the Third Way* atau Jalan Ketiga menjelaskan dunia sekarang menghadapi zaman yang *uncertain*, ketidakpastian adalah takdir yang akan dilakoni oleh dunia hari ini (Giddens, 2013). Pada titik tertentu semua yang dihadapi manusia hari ini adalah akibat manusia sendiri, apa yang digambarkan oleh sejarawan sebagai akibat dari industrialisasi yang dipacu manusia terutama dalam hal ini adalah revolusi pertanian (Harari, 2014). Apa yang dikatakan Giddens sebagai *manufactured risk* (Giddens, 2013), resiko yang disebabkan oleh industrialisasi. Dan sebenarnya kita sebagai manusia sudah lama sadar dan mengidentifikasi apa kesalahan kita terhadap keseimbangan alam! Setidaknya sejarah revolusi industri, dampak industrialisasi yang menyebabkan kegoncangan keseimbangan alam masih terekam jejaknya sehingga kini.

Bagaimana dengan kohesi sosial saat ini? sebagai masyarakat, kita perlu bersatu dan tidak egois dengan terus merapatkan toleransi sosial antar kita. Keputusan untuk *working from home* (WFH) pada aspek tertentu sangat mendukung kebijakan *social distancing* ataupun *physical distancing* oleh pemerintah untuk melandaikan potensi mereka yang terpapar. Kohesi sosial adalah kunci menghadapi situasi kritis, sebuah semangat saling percaya dan

saling ketergantungan antar elemen bangsa. Pandemi Covid-19 ini akan segera berakhir jika semua elemen masyarakat global berhasil mewujudkan *trust*. Semangat itu harus dimulai dengan kita percaya bahwa orang lain juga percaya melakukan hal yang sama. *Social Distancing* atau *Physical Distancing* yang sedang digaungkan hari ini tidak akan berjalan dengan baik jika kita tidak punya *trust* bahwa orang lain juga akan melakukan hal yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Ortega dan Orsini memberikan sebuah penjelasan dalam konteks Brazil ternyata Pandemi Covid-19 melahirkan sebuah formula baru solidaritas antara komunitas asli Brazil ketika Pemerintah tidak hadir dengan baik dalam penanganan Pandemi Covid-19 “*we highlight the new forms of solidarity and mutual aid that have emerged in favelas and Indigenous communities, which have stepped in to fill the void left by a limited federal presence*”(Ortega and Orsini, 2020: 1). Kasus Brazil memberikan sebuah pelajaran berharga solidaritas sebagai bagian dari unsur kohesi sosial adalah kunci mereduksi persebaran Covid-19.

Pada bagian lain, Pemerintah Indonesia tidak sendirian mengelola kegamangan, hal sama juga dihadapi oleh Pemerintah Singapura walaupun dalam beberapa aspek Singapura jauh lebih siap terutama dalam hal kesiapan *public health care system* dalam mengatasi Pandemi Covid-19, Woo (2020: 345) menjelaskan:

Despite its excellent public healthcare system and efficient public administration, Singapore has been severely affected by the COVID-19 pandemic. While fatalities in the city-state remain low and contact tracing efforts have been largely successful, it has nonetheless experienced high rates of infection and the emergence of large infection clusters in its foreign worker dormitories [...] in doing so, I argue that the presence of fiscal, operational and political capacities that were built up after the SARS crisis had contributed to Singapore’s low fatality rate and contact tracing capabilities while deficiencies in analytical capacities may explain its high infection rate.

Sekali lagi dalam konteks ini, peran dan posisi pemerintah sangat vital disini untuk menjadi katalis titik *equilibrium* sehingga *trust* itu mewujud ke semua elemen bangsa. Pada bagian lain, jika

Inggris sanggup membayar 80% gaji orang yang tidak bekerja akibat Covid-19. *Trust* itu juga akan terwujud jika ada keadilan, setidaknya keadilan *treatment* pemerintah terhadap setiap kelompok warganya. Masyarakat tidak mampu adalah kelompok yang paling terdampak dari situasi ini, mereka yang harus bekerja harian untuk bertahan hidup. Pemerintah mesti tanggap dan menyiapkan strategi khusus subsidi-*kah* dan *boosting* ekonomi pada mereka yang terdampak secara ekonomi disamping tetap fokus pada pertarungan sesungguhnya melawan Covid-19.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

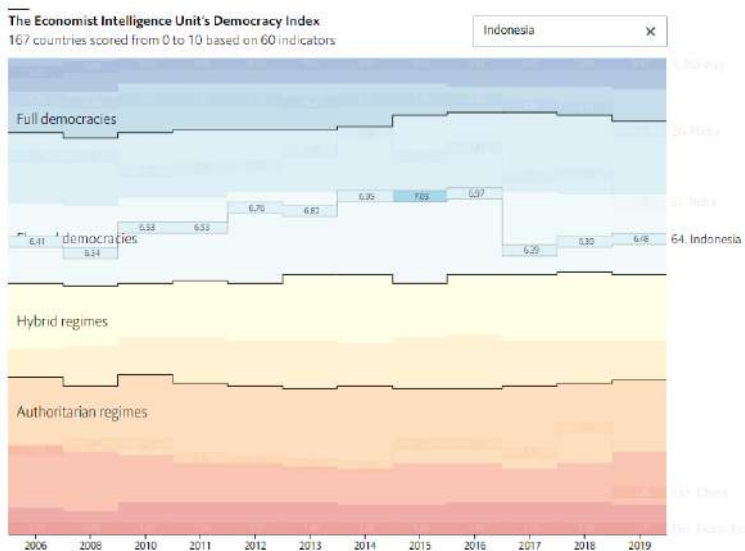
Covid-19, Demokrasi dan Opsi Peniadaan atau Penundaan Pilkada 2020

Banyak hal dari Pilkada yang dapat menjadi pembahasan secara akademik. Pilkada memang melahirkan beragam debat, retorika dan diskusi panjang. Majalah terkenal Inggris, *the Economist* baru-baru ini melakukan penilaian terhadap kinerja demokrasi dunia. Dalam satu artikelnya yang berjudul “*Global Democracy has another Bad Year*” yang terbit pada tanggal 22 Januari 2020. *The Economist* melakukan penilaian terhadap 167 negara dengan menggunakan 60 poin indikator dan angka penilaian 1 sampai dengan 10 menyimpulkan demokrasi dunia terbagi dalam 4 (empat) kategori (*the Economist*, 2020).

Selanjutnya, masing-masing kategori mempunyai definisi dan makna tertentu. *The Economist* lebih lanjut membagi kategori itu kedalam kriteria (*the Economist*, 2020): *Full Democracy* (Demokrasi Penuh), *Flawed Democracy* (Demokrasi yang dikarakterkan dengan beberapa kelemahan fundamental), *Hybrid Regimes* (Rejim Hibrid) dan *Authoritarian Regimes* (Rejim Otoriter). Lebih lanjut *the Economist* menjelaskan, indeks yang diukur meliputi antara lain proses pemilu, pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi poliik, budaya politik demokratis dan kebebasan sipil.

Pada tahun 2018, *the Economist* memberikan kesimpulan sangat mengejutkan, kurang dari 5% negara di dunia yang dikategorikan sebagai *Full Democracy* dan lebih dari sepertiga

negara dunia hidup dalam rejim yang otoriter dan yang paling terbesar adalah Tiongkok (the Economist, 2018). *The Economist* menilai Indonesia adalah negara dengan tipikal demokrasi yang lemah (*Flawed Democracy*) dan berada pada peringkat 64 dunia dengan indeks tahun 2019 adalah 6,48 (the Economist, 2020). Dalam kajian *the Economist Intelligent Unit* didapatkan masih terdapat beberapa karakter fundamental yang menjadi bagian dari pelemahan Demokrasi Indonesia secara umum, hal tersebut yang akhirnya menyebabkan Indonesia dianggap belum berdemokrasi secara penuh (*Full Democracy*) (Silahkan lihat Gambar 1).



Gambar 1 Indeks Demokrasi Indonesia
Sumber: the Economist (2020)

Adakah masalah krusial dengan Demokrasi Indonesia? setelah lebih dari 20 tahun reformasi politik tidak memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Analisis *the Economist* bukannya tidak berdasar dengan menempatkan Indonesia masih dalam kategori demokrasi yang lemah (*Flawed Democracy*), setidaknya secara kasat mata penilaian yang dilakukan oleh *the Economist* sangat relevan dengan kondisi kekinian demokrasi Indonesia.

Secara substantif pemilu kita memang masih jauh dari ideal dilihat dari beragam permasalahan yang timbul baik yang disebabkan oleh alasan teknis maupun *content* dalam konteks proses pemilu itu sendiri. Berbagai dialog di lapangan misalkan kita dapatkan data bahwa secara teknis, pemilu kita memang sangatlah kompleks walaupun pada dasarnya sistem pemilu proporsional memberikan peluang bagi setiap kelompok kepentingan terakomodasi dalam proses politik dan pemilu, komplikasi itu kemudian berimbas pada tingkat partisipasi politik walaupun dalam Pemilu 2019 ada peningkatan tren akan tetapi pertanyaan sampai kapan tren ini akan tetapi baik?

Walaupun ada indikasi peningkatan angka partisipasi politik pada beberapa Pilkada dan juga Pmeilu 2019 yang lalu, mungkin juga hal ini disebabkan oleh semakin masifnya politik uang. Hal ini mempunyai makna, dalam pandangan *grassroots*, pemilih menyalurkan suara politiknya dengan mengikuti pemilu dan ini bisa saja disebabkan oleh dorongan motif politik uang, dan ini perlu penelitian lebih lanjut. Penelitian kerjasama Magister Ilmu Pemerintahan Unila bersama KPURI misalkan memberikan gambaran ada 6 hal yang patut dipertimbangkan dalam konteks partisipasi politik: sistem, administarsi, penyelenggara, peserta, pemilih dan geografi-cuaca (Warganegara dkk., 2019)..

Pada bagian lain, kajian *the Economist* tentunya menambah pekerjaan rumah bagi kita semua, satu hal yang kentara melemahkan demokrasi kita hari ini adalah persoalan masifikasi politik uang. Gejala masifnya politik uang ini ternyata mendorong proses politik berdasar pada logika kekuatan finansial. Sesungguhnya, menjadi naif demokrasi dikaitkan dengan kekuatan modal padahal secara filosofis demokrasi adalah proses mengakomodasi keinginan publik melalui mekanisme formal sistem politik.

Memperbaiki proses demokrasi ternyata memerlukan beragam ‘vaksin’ dimulai dari peningkatan kesejahteraan warga negara, pendidikan politik dan internalisasi platform ideologi kepartaian serta memperbaiki hubungan antar elit dan pendukung. Selama ini demokrasi patronase yang melanda Indonesia ditandai dengan hubungan elit, pemodal dan pemilih berteraskan dominasi

tersebut terletak pada elit politik, akan tetapi ada satu kalimat yang bisa jadi renungan bersama bukankah menyuarakan suara publik adalah bagian dari definisi hakiki wakil rakyat dan pemerintah.

Walaupun akhirnya, Pemerintah bersama DPR RI akhirnya memutuskan untuk menunda Pilkada menjadi Desember 2020, penundaan tersebut tertuang dalam PERPU No. 2 Tahun 2020. Pada awalnya, setidaknya 3 (tiga) skenario penundaan Pilkada 2020 yang dibicarakan dan ditangkap oleh publik .

Skenario pertama, Pilkada ditunda 3 bulan dari jadwal yang sudah ditetapkan yaitu September 2020. Mengacu pada skenario ini, Pilkada akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020, skenario ini menjadi opsi sementara Pemerintah sembari menunggu masa tanggap darurat berakhir Mei 2020, kemudian akan diputuskan kembali apakah skenario pertama akan berjalan atau tidak. **Skenario kedua**, Pilkada akan ditunda selama 6 bulan menjadi Maret 2021. **Skenario Ketiga**, Pilkada akan ditunda setahun yang artinya Pilkada akan berlangsung September 2021, kemungkinan skenario ini akan terjadi jika BNPB menyatakan memperpanjang masa tanggap darurat paska 29 Mei 2020.

Secara teknis, administratif dan keuangan, kajian ini melihat jika mengacu pada ketiga pilihan tersebut diatas, maka pilihan yang relatif “masuk akal” Pilkada lebih baik dimundurkan menjadi April atau September 2021 ketimbang opsi Desember 2020 tentunya juga membuka opsi untuk meniadakan pilkada dengan melihat asumsi dan *timeline* persiapan Pilkada serta melihat hasil analisa beberapa *modelling* statistik yang dibuat untuk memprediksi laju Pandemi Covid-19. Jika kemudian Pemerintah mengacu pada pengalaman Korea Selatan yang tetap menyelenggarakan Pemilu dimasa pandemi.

Kajian ini memberikan catatan bahwa sistem mitigasi Pandemi Covid-19 kita tidak lebih baik dan efisien dibandingkan Korea Selatan. *Thus*, jika pilihan Pilkada disaat pandemi tetap dilakukan, pilihan ini tentunya sangat beresiko., Kim (2020) dalam konteks Korea Selatan menekankan bahwa, aspek protokol kesehatan bukan segalanya yang lebih penting adalah kerjasama antara semua

tingkatan pemerintah dan kesehatan public serta kepercayaan publik:

However, the replication of [South Korea's success in Canada] will require not only safety measures put in place at polling stations on the voting day, but also greater co-operation with public health and safety branches of various levels of government, as well as stronger public trust – which will only be earned if Canada and its provinces and territories are able to keep the outbreak in check.

Pun, jika nantinya Pilkada diselenggarakan pada bulan September 2021, tidak kemudian hal ini menyelesaikan masalah. Penundaan satu tahun bukanlah penundaan yang ideal secara politik. Masalah lanjutan muncul soal berapa lama masa jabatan kepala daerah terpilih kelak? Jika dihitung kemungkinan masa jabatan Kepala Daerah (KDH) terpilih hanya akan kurang lebih 2 (dua) tahun. Hal ini merujuk pada ¹³ UU No. 10 Tahun 2016 soal Pilkada serentak nasional yang akan diselenggarakan pada November 2024. Pada bagian lain, masa menjabat dua tahun tidaklah masuk akal untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang maksimal walaupun *by Law*, KDH harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan akhir masa jabatan pada tahun 2024. Belum lagi jika KDH terpilih bicara soal “*balik modal*”.

Ketiga skenario penundaan Pilkada diatas tidak ada yang ideal, oleh sebab itu selain merekomendasikan untuk menunda Pilkada, kajian ini juga mendorong pemikiran alternatif soal Pilkada 2020. Kajian ini mengusulkan ² meniadakan Pilkada 2020 menjadi opsi yang bisa diambil oleh Pemerintah dan DPR. Dana besar penghapusan Pilkada 2020 dapat kita dialihkan bagi pemulihan ekonomi paska Covid-19, dan ruang fiskal tersebut dapat dimanfaatkan.

Secara teknis dan sejatinya peniadaan Pilkada 2020 sempena Pandemi Covid-19 bisa dilakukan jika elite politik bersepakat. Pemerintah dan DPR bisa memasukan cluster Pilkada 2020 disamakan dengan status KDH yang berakhir 2022 dan 2023. Terdapat 3 (tiga) opsi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah jika kajian mengenai opsi peniadaan pilkada tadinya dimasukan

dalam kategori pilihan pemerintah. Menurut Warganegara (2020d), ketiga pilihan tersebut adalah:

Opsi pertama, pemerintah pusat dapat memperpanjang masa jabatan KDH dan bertugas untuk mempersiapkan Pilkada serentak nasional 2024. Pilihan ini berdampak pada regulasi yang mengatur tentunya. Sampai saat ini kita tidak punya perangkat hukum untuk memperpanjang periode kepemimpinan KDH untuk periode kedua. Skenario ini mesti masuk dalam pertimbangan Pemerintah Pusat walaupun dalam perjalanannya kelak akan banyak tantangan baik dari kelompok politik maupun kelompok masyarakat sipil.

Opsi kedua, skenario *fifty-fifty* artinya KDH yang sekarang menjabat diperpanjang masa jabatannya dikombinasikan dengan Pejabat KDH. Misalkan KDH lama diperpanjang masa jabatan sampai 2-3 tahun dan kemudian 1-2 tahun menjelang Pilkada serentak 2024, pemerintah pusat mengganti KDH lama dengan Pejabat KDH (tugas utama mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2024). Skenario ini terhitung moderat, pada satu sisi roda pemerintahan daerah bisa berjalan normal sampai dengan 2 atau 3 tahun kedepan sebelum Pejabat KDH menggantikannya, secara regulasi Pejabat KDH juga tidak berwenang mengambil keputusan strategis daerah. Skenario ini mendorong *win-win solution*. Dengan skenario moderat ini, ada pembagian antara memperpanjang masa jabatan KDH dan kewenangan pusat untuk memaksimalkan peran Pejabat KDH.

Opsi ketiga, periode tunggu sampai dengan Pilkada serentak nasional 2024, KDH akan diisi oleh Pejabat KDH. Jika opsi ini yang dipilih, Pemerintah dan DPR juga harus membuat sebuah terobosan hukum dengan memberikan kewenangan kepada Pejabat KDH dapat mengambil keputusan strategis daerah. Pilihan skenario ketiga ini pun memerlukan perangkat hukum yang mengatur seperti halnya skenario pertama dan kedua.

IV. KESIMPULAN

Reformasi politik pada tahun 1998 menjadi era baru penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2000, berdasarkan pada Undang-Undang 22 tahun 1999, Pemerintah Pusat memberikan otonomi daerah pada Kabupaten dan Kota menjadikan

setiap daerah mempunyai peluang untuk mengembangkan demokrasi lokal. Pada tahun 2005, berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 sistem pemilihan kepala daerah secara langsung diselenggarakan. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung pada tahun 2005.

Sampai dengan saat ini mekanisme pemilihan kepada daerah tidak dirubah, pemilihan kepala daerah masih dilaksanakan secara langsung. Dalam sistem *one man one vote* (satu orang memilih satu) membuat kompetisi Pilkada sangat dinamis, dimulai dari kompetisi antar calon sampai dengan mekanisme pencalonan calon dari partai politik yang sangat pragmatis. Pada bagian lain, beragam permasalahan yang ada tentunya menjadi sangat lumrah jika melihat usia demokrasi Indonesia yang relatif masih muda dibandingkan dengan negara maju lainnya.

Secara umum, Pilkada merupakan sistem yang dapat mendukung terwujudnya demokrasi rakyat akan tetapi banyak tantangan untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain perilaku membeli suara (Aspinall and Berenschot, 2019). Setelah menunda Pilkada 2020 yang seharusnya diselenggarakan pada bulan September yang lalu, Pemerintah dalam hal ini Presiden bersama DPR RI menyepakati bahwa Pilkada akan terus berjalan pada tanggal 9 Desember 2020 walaupun penyebaran Covid-19 masih belum mereda. Ada beberapa hal yang menjadi hal penting terutama kesiapan penyelenggara dalam menyukseskan Pilkada kali ini, menyeimbangkan sukses penyelenggaraan dan menekan penyebaran virus Covid-19.

Sekali lagi, ketiga opsi diatas memerlukan sebuah terobosan hukum dan kesepakatan konsensus antar elite negeri ini. Terobosan hukum secara politik bisa dilakukan jika mengacu pada dampak Pandemi Covid 19 terhadap dunia. Pada akhirnya, kata kunci soal ini adalah *strong and fair leadership*. Secara politik, seharusnya Presiden Jokowi mampu melakukan ini karena hampir semua elit parpol merapat pada kubu pemerintah, tinggal bagaimana komunikasi antar elite ini bisa berjalan dengan baik. Dan itu yang kita harapkan bagi perkembangan demokrasi Indonesia, menjalankan

ketiga opsi diatas bukan berarti menghapuskan Pilkada, kasus yang sifatnya *extraordinary* seharusnya juga disikapi dengan keputusan politik yang *extraordinary*.

Pada akhirnya, bagaimana dampak politik Covid-19 jika Pilkada diteruskan? beberapa kajian menyebutkan bahwa Pandemi Covid-19 akan berdampak pada beberapa kemungkinan dinamika Pilkada.

Pertama, kemungkinan partisipasi politik akan sangat rendah, masyarakat tentunya akan kuatir untuk keluar rumah dan menuju TPS, dalam konteks ini, kita menguatirkan KDH terpilih akan mengalami krisis legitimasi walaupun tidak ada ukuran yang spesifik berapa % pemilih berpartisipasi akan menggagalkan hasil Pilkada (Warganegara, 2020a). Sebenarnya bukan aspek itu yang ingin kita soroti akan tetapi partisipasi politik ini penting karena menyangkut legitimasi KDH yang terpilih secara politik. Pada bagian lain, sejak lama beberapa kajian sudah memberikan masukan pada Pemerintah, DPR RI dan KPU RI untuk segera menggunakan perangkat *electronic voting* (*E-Voting*) dengan merujuk pada Brazil dan India yang secara demografi berjumlah penduduk relatif sama dengan Indonesia sudah menggunakan *E-Voting* (Ofori-Dwumfuo and Paatey, 2011). Pada bagian lain tidak ada solusi solutif yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI misalkan dengan membuka opsi *Postal Voting* atau *Voting by post* (atau memilih melalui pos) padahal PT Pos Indonesia punya kapasitas yang mumpuni untuk distribusi dan *collecting* kertas suara baik pada Pemilu dan Pilkada (Warganegara, 2020c). Hal ini tentu juga akan menyebabkan potensi persoalan lain Pilkada di era pandemi.

Kedua, situasi seperti ini berpotensi membuat politik uang kian tidak terkendali. Memang belum ada penelitian terutama seberapa kuat politik uang memengaruhi pemilih untuk datang ke TPS. Akan tetapi secara kasat mata kemungkinan pemilih menuju TPS disaat situasi pandemi seperti ini akan besar jika faktor politik uang dimainkan. Dalam situasi tidak menentu, politik uang akan memainkan peran dominatif-nya untuk 'memaksa' pemilih keluar rumah menuju TPS. Sekali lagi ini penilaian kualitatif dan perlu data statistik pendukung (Warganegara, 2020a). Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan hasil Pilkada akan sangat jauh dari demokrasi ideal.

Calon dengan dukungan finansial yang besar atau didukung finansial yang kuat akan sangat diuntungkan dengan situasi seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. & Berenschot, W. 2019. *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*, Cornell University Press.
- Burki, T. 2020. The online anti-vaccine movement in the age of COVID-19. *The Lancet Digital Health*, 2, e504-e505.
- Cassam, Q. 2019. *Why conspiracy theories are deeply dangerous* [Online]. London New Statesman Available: <https://www.newstatesman.com/world/north-america/2019/10/why-conspiracy-theories-are-deeply-dangerous> [Accessed 24th of November 2020 2020].
- Giddens, A. 2013. *The third way: The renewal of social democracy*, John Wiley & Sons.
- Greer, S. L., King, E. J., Da Fonseca, E. M. & Peralta-Santos, A. 2020. The comparative politics of COVID-19: The need to understand government responses. *Global public health*, 15, 1413-1416.
- Harari, Y. N. 2014. *Sapiens: A brief history of humankind*, Random House.
- Kim, D. 2020. *Democracy in the Time of COVID-19: South Korea's Legislative Election* [Online]. Canada: Asian Pacific Foundation of Canada. Available: <https://www.asiapacific.ca/publication/democracy-time-covid-19-south-koreas-legislative-election> [Accessed 24th of November 2020 2020].
- Ofori-Dwumfuo, G. & Paatey, E. 2011. The design of an electronic voting system. *Research Journal of Information Technology*, 3, 91-98.
- Ortega, F. & Orsini, M. 2020. Governing COVID-19 without government in Brazil: Ignorance, neoliberal authoritarianism, and the collapse of public health leadership. *Global public health*, 15, 1257-1277.
- Rankin, J. 2020. *Russian media 'spreading Covid-19 disinformation'* [Online]. London The Guardian Available: <https://www.the>

guardian.com/world/2020/mar/18/russian-media-spreading-covid-19-disinformation [Accessed 24th of November 2020 2020].

The Economist. 2018. *Democracy continues its disturbing retreat* [Online]. London the Economist Available: <https://www.economist.com/graphic-detail/2018/01/31/democracy-continues-its-disturbing-retreat> [Accessed 24th of November 2020 2020].

The Economist. 2020. *Global democracy has another bad year* [Online]. London The Economist Available: <https://www.economist.com/graphic-detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year> [Accessed 24th of November 2020 2020].

Warganegara, A. 2020a. *Covid-19 dan Penundaan Pilkada* [Online]. Bandar Lampung: Lampung Post Available: <https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-penundaan-pilkada/> [Accessed 1st of December 2020 2020].

Warganegara, A. 2020b. *Demokrasi Kita, Politik Uang dan Caden*. Lampung Post 2nd of March 2020.

Warganegara, A. 2020c. *Mempertanyakan Pilkada New Normal*. Lampung Post, June 15th 2020.

Warganegara, A. 2020d. *Politik di tengah pandemi: pertimbangan untuk meniadakan Pilkada 2020* [Online]. Jakarta: The Conversation Available: <https://theconversation.com/politik-di-tengah-pandemi-pertimbangan-untuk-meniadakan-pilkada-2020-137931> [Accessed November 17th, 2020 2020].

Warganegara, A., Hertanto, H., Cahyadi, R. & Maryanah, T. 2019. *Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung Pusaka Media.

Woo, J. 2020. Policy capacity and Singapore's response to the COVID-19 pandemic. *Policy and Society*, 39, 345-362.

Catatan Kaki

Tulisan ini dikembangkan dari berbagai artikel lepas pada dua platform the Conversation Indonesia dan Lampung Post.

Biodata Penulis dan Editor

ADI SUSANTO dilahirkan di Palembang tanggal 30 Desember 1982, menyelesaikan Diploma 3 Akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya pada Tahun 2004, dan menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada jurusan Akuntansi di Universitas Jambi Tahun 2017. Tahun 2009 diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat KPU Provinsi Jambi. Saat ini sedang menempuh tugas belajar pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Kosentrasi Tata Kelola Pemilu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

AHMAD ROBI ULZIKRI dilahirkan di Jawa Tengah pada 16 Juli 1997, menyelesaikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung pada tahun 2019. Saat ini aktif sebagai mahasiswa pada konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Penulis tertarik pada riset politik lokal khususnya di Lampung. Penulis juga merupakan founder media pembelajaran online ilmu politik *www.ilmupolitik.id*.

ARIZKA WARGANEGARA adalah Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung menyelesaikan S-1 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila (2003) dan S-2 Ilmu Politik Universiti Kebangsaan Malaysia (2005). Menyelesaikan S-3 (Ph.D) bidang *Political Geography* pada University of Leeds, Inggris. Selain sebagai Dosen, bekerja secara paruh waktu dan *voluntary* sebagai Senior Research Fellow pada Amcolabora Institute.

ASEP NURJAMAN merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 1993. Riwayat pendidikan formal di sekolah dimulai dari Madrasah Ibtidiyah Garut; SMPN 2 Garut; SMAN 1 Garut, sementara pendidikan perguruan tinggi dimulai dengan menyelesaikan S1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan UNPAD Bandung pada tahun 1992; pada tahun 1998 bertepatan dengan reformasi politik di Indonesia menyelesaikan S2 pada Program Studi Ilmu Politik UGM Yogyakarta; dan pada tahun 2012 di almamater yang sama (UGM) menyelesaikan program Doktorat (S3) dalam bidang Ilmu Politik dengan judul Desertasi "Electoral Volatility Nasional dan Lokal: Studi Tentang Ketidakstabilan Sistem Kepartaian Indonesia". Jabatan yang pernah disandang mulai dari Pembantu Dekan sampai Dekan di FISIP-UMM. Pada saat ini menjabat sebagai Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) uni-link Universitas Muhammadiyah Malang dan Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah.

BENDI JUANTARA dilahirkan di Sukadana pada tanggal 23 September 1988, menyelesaikan Sarjana (S-1) di Universitas Lampung, S-2 di Universitas Gadjah Mada (Bidang Ilmu Peer Group Ilmu Politik). Saat ini beliau berstatus sebagai dosen aktif mengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan jabatan tenaga pengajar.

BUDI KURNIAWAN adalah Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, memperoleh gelar S-1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Gadjah Mada dan Gelar Master of Public Policy pada Crawford School of Public Policy, the Australian National University. Aktif menulis diberbagai jurnal dan media massa.

DARMAWAN PURBA dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1981, menempuh pendidikan S-1 di FISIP Universitas Lampung kemudian melanjutkan S2 di FISIP Universitas Lampung (Bidang ilmu politik dan pemerintahan). Saat ini beliau berstatus sebagai dosen aktif mengajar pada program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selain itu, saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

DWI WAHYU HANDAYANI adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung sejak 2008. Pernah menjadi Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Unila tahun 2013 hingga 2018. Ketertarikan pada kajian gender dan politik, migrasi, politik identitas, dan *human security*. Saat ini sedang studi di S3 pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

EFRIZA adalah Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), di Jakarta. Selain di STIP-AN, ia mengajar di USNI dan UBK juga merupakan Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian dan Penelitian di Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP). Aktif menulis dalam karya buku politik, juga di berbagai jurnal, media online, dan surat kabar, serta acap kali diminta mengedit naskah buku Ilmu Politik, dan sebagai pembicara dalam kajian Parlemen, Pemilu, dan Partai Politik.

ERWIN OCTAVIANTO adalah Peneliti Ekonomi di Centre for Urban and Regional Studies (CURS). Ketertarikan pada kajian bidang ekonomi dan politik pembangunan daerah. Menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

HANDI MULYANINGSIH, dilahirkan di Kudus pada tanggal 16 Desember 1963. Dosen ASN di FISIP Universitas Lampung dari 1989-sekarang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro. Kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Sosiologi FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sedang menyelesaikan program Doktor (S3) di prodi Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung. Aktif di Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan (KKGP) FISIP Unila. Pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi Lampung pada tahun 2008-2019.

HERTANTO, dilahirkan di Tegal pada tanggal 10 Oktober 1960. Menyelesaikan pendidikan sarjana muda (BA) dan sarjana (S1) di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang (1985). Menyelesaikan pendidikan pascasarjana Ilmu Politik pada FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1997). Doktor Sains Politik pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia diselesaikan pada tahun 2014. Sehari-hari bertugas sebagai dosen ASN pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (2015-2019; 2019-2023). Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan (2001-2004) dan Dekan FISIP Unila (2004-2008).

JUMADI dilahirkan di daerah ujung wilayah Selatan Kabupaten Ketapang-Kalbar, tepatnya di Kecamatan Kendawangan pada tanggal 5-Agustus-1971. Pekerjaan sebagai Dosen S1 FISIP Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak. Selain itu juga mengajar di S2 Program Studi Ilmu Politik Magister Ilmu Sosial FISIP UNTAN. Pendidikan S1 diselesaikan di jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNTAN tahun 1995, S2 Ilmu Politik UGM Yogyakarta tahun 2003, dan S3 Sains Politik Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) diselesaikan pada tahun 2013. Sekarang menjabat sebagai Staf Ahli Rektor UNTAN dan anggota TPD DKPP Provinsi Kalbar dari unsur masyarakat.

KHAIRUNNISA MAULIDA dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1997, menyelesaikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung pada tahun 2019. Saat ini aktif sebagai mahasiswa pada konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

MEILİYANA adalah dosen pada jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung. Meiliyana. Lahir di Tanjungkarang, 20 mei 1974. Saat ini adalah Dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila. Pendidikan formal S-1 Jurusan Administrasi Negara FISIP UNSRI dan S2 International Cooperation and Policy Studies, University of Kobe, Jepang.

MOHAMMAD MAIWAN dilahirkan di Gresik pada tanggal 18 Maret 1968. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, S2 Ilmu Politik, Pascasarjana UGM, dan S3 Sains Politik Universitas Kebangsaan Malaysia. Pengalaman Pekerjaan: Dosen pada program studi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ (1999-Sekarang), Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta (2009-2011), Pengkaji Madya pada Lemhannas RI (2010-2013), Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Jayabaya Jakarta (1995-2004), dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Perbanas Jakarta (1999-2001).

RICKY FEBRIANSYAH dilahirkan di Palembang pada tanggal 29 Februari 1984, menyelesaikan S1 Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Teknik Informatika Universitas Bina Darma Palembang tahun 2007. Status PNS sekretariat KPU Kab. Bangka Tengah sekarang sedang menempu pendidikan kosentrasi Tata Kelola Pemilu Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

ROBI CAHYADI KURNIAWAN dilahirkan di Gisting pada tanggal 30 April 1978, menyelesaikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran pada tahun 2001 dan S-2 Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 serta Doktor (S-3) Ilmu Politik di Universitas Padjajaran pada tahun 2018. Pengamat Politik Lampung ini sangat produktif dalam menulis jurnal dan opini di berbagai media massa.

SAMSUL ODE dilahirkan di Kota Tual, Maluku Tenggara pada 12 Oktober 1989. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Diponegoro dan S2 Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Saat ini berprofesi sebagai dosen dan ketua program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Selain menekuni dunia pendidikan, penulis juga menggeluti kegiatan kerelawanan dan organisasi serta komunitas baik di daerah maupun nasional.

SURYA YUDHA REGIF dilahirkan di Namu Sira-Sira, 26 Agustus 1985 menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Sumatera Utara Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lulus di tahun 2009, kemudian melanjutkan Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro dan lulus di tahun 2015, saat ini berprofesi sebagai staf pengajar pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, telah beberapa kesempatan melakukan penelitian dan dimuat dalam karya ilmiah yang tercatat dalam Scopus Q3 mengenai tata kelola pemerintahan dan SINTA 5 mengenai politik identitas dan sistem politik Indonesia.

SELVI DIANA MEILINDA adalah Dosen pada jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung lahir di Kota Agung, 18 Mei 1987. Menyelesaikan Studi S-1 pada Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung dan Magister Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

SYARIFAH EMA RAHMANIAH dilahirkan di Pontianak pada 27 Agustus 1977 menempuh pendidikan sarjana pada International Islamic University Malaysia kemudian melanjutkan Program Magister bidang ilmu pendidikan sosiologi di International University Malaysia dan S-3 pada bidang ilmu politik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saat ini berprofesi sebagai dosen di FISIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

ULFA UMASARI dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 26 Maret 1996. Telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung pada tahun 2018. Saat ini aktif sebagai mahasiswa pada konsentrasi Manajemen Pemerintahan pada program studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.

PAHMI SY dilahirkan di Senaning Kabupaten Batanghari pada tanggal 9 September 1970. Dosen pada Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin (STS), Jambi. Pendidikan S1 di Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi, melanjutkan studi S2 di FISIP Antropologi UI, dan saat ini sedang menempuh penyelesaian S3 di FISIP Antropologi UNPAD. Penulis buku Antropologi Pedesaan, Politik Pencitraan dan Silang Budaya Islam-Melayu. Konsentrasi saat ini tertuju pada antropologi lingkungan dan masyarakat pedesaan Melayu, Suku Anak Dalam, dan masyarakat transmigrasi, serta dunia politik dan kepemiluan.

PAULUS EKO KRISTIANTO menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Teologi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta; S2 Ilmu Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Paulus menekuni bidang Filsafat, Pendidikan Kristiani, Spiritualitas, Kajian Marginalitas, dan Teologi Kontemporer. Paulus merupakan Dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta serta editor dan reviewer jurnal terakreditasi nasional (Sinta 2-5).

YUDHA PRIANDA adalah mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

YULIANTO dilahirkan di Metro pada tanggal 4 Juli 1961. Profesor Administrasi Negara pertama FISIP Unila ini menempuh pendidikan strata 1 pada jurusan Administrasi Negara di Universitas Padjajaran Bandung, melanjutkan S2 di jurusan penyuluhan pembangunan IPB Bogor Kemudian kembali melanjutkan S3 di jurusan Ilmu Administrasi Universitas Padjajaran Bandung. Sekarang sedang menjabat sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Lampung.

ZAKIA SALSABILA adalah mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

● 13% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 13% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	ejournal2.undip.ac.id Internet	4%
2	theconversation.com Internet	3%
3	tandfonline.com Internet	3%
4	sekilasmalang.com Internet	<1%
5	hellosehat.com Internet	<1%
6	kliksamarinda.com Internet	<1%
7	ijis.umsida.ac.id Internet	<1%
8	akurat.co Internet	<1%
9	kuliahpemikiran.wordpress.com Internet	<1%

10	lpkapalu.kemenkumham.go.id	Internet	<1%
11	brill.com	Internet	<1%
12	repository.uin-malang.ac.id	Internet	<1%
13	repository.umj.ac.id	Internet	<1%
14	Darmawan Darmawan, M. Fajrul Falah. "Dinamika Hukum Pemilihan Ke...	Crossref	<1%
15	Muhammad Bahrul Ulum. "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setel...	Crossref	<1%
16	makalahpemerintahan.blogspot.com	Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Manually excluded sources
- Bibliographic material
- Cited material

EXCLUDED SOURCES

repository.lppm.unila.ac.id

Internet

93%

unila.ac.id

Internet

30%

microsite.lampost.co

Internet

30%